

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 175-181
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12527075>

Etika Politik Islam Dalam Pemikiran Nurcholis Majid

Ervina Suwandi¹, Auliyah Shafira Azzahra Syamsul², Khair Tasnim Razak Naba³, Kurniati⁴
¹²³⁴UIN Alauddin Makassar

*Email korespondensi: 10200122020@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

This research discusses the contemporary Islamic thinker of the 20th century, namely Nurcholis Majid. The theoretical aim of this research is to provide an academic contribution to the concept of Islamic political ethics according to Nurcholis Majid. Practically, this research reveals the political ethics of a country according to Nurcholis Majid and the method of implementing Islamic political ethics according to Nurcholis Majid. Nurcholis Majid tries to dispel the myth of political Islam as dissent or opposition to the state by rejecting its symbolic and ideological character. Apart from that, this makes it clearer that Islam must emphasize its commitment to Islamic ethical values in every government system, especially in Nurcholis' view. Implementation of Islamic ethical values. The research method used is a qualitative-interpretive method by conducting literature studies from secondary data in the form of books, journals and several documented research results. The data obtained will be collected, studied and synthesized and then analyzed carefully to get answers to the problems posed.

Abstrak

Penelitian ini membahas pemikir Islam kontemporer pada abad ke-20 yaitu Nurcholis Majid. Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberi kontribusi akademis bagaimana konsep etika politik Islam menurut Nurcholis Majid. Secara praktis penelitian ini mengungkap bagaimana etika politik suatu negara dari sudut pandang Nurcholis Majid serta bagaimana metode implementasi etika politik Islam menurut Nurcholis Majid. Nurcholis Majid berusaha menghapuskan mitos Islam politik sebagai pembangkang atau oposan terhadap negara dengan menolak watak simbolis dan ideologisnya. Selain itu, hal ini memperjelas bahwa Islam harus lebih ditegaskan komitmennya pada nilai-nilai etika Islam di setiap sistem pemerintahan terutama dari sudut pandang Nurcholis, hal inilah yang menjadi alasan peneliti menawarkan dua rumusan masalah terkait dengan analisis pandangan etika politik Islam menurut Nurcholis serta menjelas ringkaskan implementasi nilai-nilai etik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-interpretatif dengan melakukan studi literatur dari data sekunder berupa buku, jurnal, dan beberapa hasil penelitian yang didokumentasikan. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, dipelajari, dan disintesis untuk kemudian dianalisis secara seksama guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Kata kunci: *Etika Politik Islam, Islam, Nurcholis Majid.*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Nurcholis Madjid merupakan pemikir Islam kontemporer pada akhir abad ke-20 di Indonesia. Nurcholis Majid memandang etika politik dalam Islam sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Saat negara mulai mengokohkan hegemoninya terhadap rakyat, semangat demokrasi sedang dipertaruhkan. Hegemoni negara atas rakyatnya pada dasarnya bukan hal yang tabu untuk selanjutnya dijustifikasi mereduksi nilai demokrasi tersebut.¹ Dalam konteks ini, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk Allah. Selain itu, etika politik dianggap sangat penting dalam Islam karena politik berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat, yang sering melibatkan hubungan antar manusia seperti saling menghormati, menghargai, dan tidak memaksakan pendapat sendiri.² Etika politik ini harus mencakup aspek kesetaraan sosial, respek kepada orang lain,

¹Kurniati Kurniati, 'Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara : Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2018), h. 257 <<https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>>.

²Dewi Dahlan, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)', *Menara Ilmu*, 15.1 (2021), h. 42-50.

berpartisipasi aktif dalam masyarakat, berpegang kepada hukum dan keadilan, toleransi, pluralisme, dan musyawarah.³

Data menunjukkan bahwa sejak masa kemerdekaan Indonesia, politik Islam telah menjadi kekuatan yang signifikan dalam dinamika politik negara ini. Gerakan politik Islam telah berperan dalam memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kebebasan beragama. Indonesia termasuk negara populasi muslim terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2020, sekitar 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan dalam penguatan etika politik Islam memiliki potensi besar untuk membentuk sistem politik yang lebih baik bagi politik dan masyarakat di Indonesia.⁴

Alquran adalah petunjuk bagi umat Islam, maka tidak berlebihan apabila Alquran dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab bagaimana hidup yang baik. Dengan demikian Alquran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Imran/ 3:159

لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ ۖ حَوْلَكَ مِنْ لَأَنْفَضُوا الْقُلُوبَ غَلِيظَةً فَطَأَّ كُنْتِ وَلَوْ ۖ لَهُمْ لَئِنَّ اللَّهَ مِنْ رَحْمَةٍ قَبِيمًا
الْمُتَوَكِّلِينَ يُجِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ عَلَىٰ فَنَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرُهُمْ

Terjemahannya :

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.⁵

Dalam konteks politik, Nurcholis Majid menganggap bahwa ideologi Islam masa silam sangat kuat perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia secara universal.⁶ Etika politik Islam merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Etika politik dalam Islam adalah penting karena politik adalah bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk Allah.⁷

Beberapa pendapat mungkin kurang setuju bahwa konsep etika politik Islam menurut Nurcholis Majid dapat mengubah atau mengurangi kekuatan ajaran tradisional Islam yang telah lama dianut oleh masyarakat. Sehingga penelitian ini akan menjelaskan prinsip-prinsip etika politik yang digagas oleh Nurholis Majid, seperti demokrasi, keadilan, dan keterbukaan. Selain itu, penelitian akan juga mengkaji konsep etika politik dari perspektif filosof dan pemikir Muslim, serta etika politik Barat.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diinginkan, seperti studi teoritis, analisis tematik hadis tentang etika politik dalam Islam, dan pengkajian prinsip-prinsip etika politik yang digagas oleh Nurcholis Majid.⁸

Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yang berbasis pada studi teoritis, analisis tematik hadis tentang etika politik dalam Islam, dan pengkajian prinsip-prinsip etika politik yang digagas oleh Nurcholis Majid. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian yang berbasis pada library research, yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan memahami karya-karya Nurcholis Majid yang berkaitan dengan etika politik dalam Islam.⁹

³Ahmad Amin and Abdul Qadir Jailani, 'Etika Politik Dalam Pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyah Losari-Ploso Jombang', h. 1–21.

⁴Dwi Hartini, 'Hegemoni Pemikiran Keagamaan: Etika Politik Dalam Perspektif Wahdah Islamiyah', *Asketik*, 3.1 (2019), h. 47–59 <<https://doi.org/10.30762/ask.v3i1.1157>>.

⁵Ganesh Prasad Kumble and others, Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam *ISLAM, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 2020, LIII-<<https://learnquantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp>>.

⁶Icpen 'Etika Politik Perspektif NurKholis Majid', *Resma*, 3.2 (2016), h.13–22.

⁷Franz Magnis Suseno and others, 'Franz Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern', Cet. Ke 7, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 21'.

⁸Muhammad Jawahir, 'Analisis Pemikiran Nurcholis Majid Tentang Politik Islam', *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 53.95 (2012), h. 45–52.

⁹Muflihudin, 'Pemikiran Politik Nurcholis Majid Tentang Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa', 2018 h.53-65.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah terkait hukum dan politik, seperti buku negara hukum dan demokrasi, *The Rule of Law*, dan jurnal politik oligarki dan perampasan tanah di Indonesia. Dari penelitian sebelumnya masih adanya kekurangan terkait etika politik Islam Nurcholis Majid, seperti keterbatasan ruang lingkup, keterbatasan data, dan keterbatasan perspektif¹⁰ Penelitian ini mencoba untuk memperluas ruang lingkup, memperdalam analisis, dan menggali perspektif yang lebih luas untuk lebih memahami dan menggali konsep etika politik Islam Nurcholis Majid secara komprehensif.

METODE

Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif yang datanya bersumber dari buku-buku dan jurnal yang diperoleh melalui google scholar, kemudian dikelola dengan kata-kata deskriptif. Sementara itu sumber kepustakaan dikelola melalui aplikasi mendelay. Selain menggunakan pendekatan historis juga menggunakan pendekatan substansi. Melalui Pendekatan histori, peneliti mencoba meneliti latar belakang konsep etika politik Islam, dan dengan pendekatan substansi peneliti mencoba mengemukakan berbagai pemikiran etika politik islam yang dihasilkan oleh tokoh tersebut yaitu Nurkcholis Majid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi Etika Politik Islam Menurut Nurcholis Majid

Kebebasan merupakan hak yang imanen dengan keberadaan setiap individu sebagai seorang manusia¹¹ sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia, harus memiliki perilaku/tindakan yang baik. Hal demikian menjadi keniscayaan agar kehidupan manusia di tengah manusia lainnya dapat berjalan dengan baik, aman, serta nyaman, dimana tiap manusia akan tertanan sikap untuk saling membantu dan menghargai satu dengan lainnya. Dalam konteks inilah kemudian manusia menjadi makhluk beretika.¹² Manusia adalah makhluk ethos and mores, namun sayangnya tidak semua menyadari akan hal itu, sehingga tidak jarang banyak tergelincir dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai kemakhlukannya sebagai insan yang beretika dan bermoral.¹³

Kerangka konseptual seluruh pemikiran Nurcholish dibangun dari sebuah pertanyaan yang fundamental yaitu bagaimana Islam yang universal bisa ditempatkan dalam kerangka kemodernan dan budaya lokal. Islam adalah universal dan implikasi dari keuniversalnya adalah bahwa Islam harus dapat dipahami dan dilaksanakan pada setiap ruang dan waktu. Dengan demikian Islam bisa bahkan harus disesuaikan dengan kemodernan. Jika terjadi konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas, maka yang harus dilakukan adalah bukan menolak modernitas tersebut melainkan menafsirkan kembali ajaran tersebut. Keotentikan dan kemodernan tidak dapat dilepaskan dalam merespon permasalahan umat. Dengan kata lain diperlukan kesadaran akan kekayaan tradisi sekaligus kemampuan untuk senantiasa membuat inovasi dalam “ruang” Indonesia dan “waktu” zaman modern.¹⁴

Secara etimologis, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral. Berbeda dengan etika, moral lebih tertuju pada prinsip-prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk. Norma (norm) adalah standar, pola (pattern), dan model (type). Moral merupakan aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.¹⁵

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.

¹⁰ Aldy dwi mulyana, ‘Etika Politik Arkoun Dengan Negara Hukum Demokratis’, *Journal Information*, 2.30 (2013), h. 1–17.

¹¹ Kurniati Kurniati, ‘Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci’, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2018), h. 257 <<https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>>.

¹² Novita ika Wardani and others, *Ilmu Sosial Budaya Dasar Untuk Kependidikan*, CV. Budi Utama, 2023.

¹³ Nurul Qamar, *Etika Dan Moral Profesi Hukum: (Ethos and Mores Profession of Law)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).

¹⁴ Noel Stocks, ‘Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi) Nasitotul Janah’, 2016, h. 1–23.

¹⁵ Qamar.

Menurut Nurcholish Madjid, dalam kehidupan etika politik kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar akhlak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika politik. Tuntunan moral yang tinggi dalam etika politik, Nurcholish Madjid secara konsisten dijelaskan olehnya yaitu meliputi prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan. Permasalahan prinsip moral kemanusiaan dan keadilan ini, dalam pandangan Nurcholis Madjid merupakan hal yang mutlak penting adanya. Karena merupakan landasan ketahanan suatu bangsa menghadapi perubahan kehidupan yang semakin kompleks.

Persoalan etika menggambarkan makna sentral semangat kepatuhan kepada hukum atau aturan sebagai tiang pancang masyarakat berperadaban. Menurut bahasa politik modern, ini adalah orientasi hukum dan keadilan yang mendasari perkembangan suatu peradaban. Orientasi ini sangat penting dalam menumbuhkan negara hukum dan mencegah munculnya negara kekuasaan.

Permasalahan prinsip moral dalam pandangan Nurcholis Madjid merupakan hal yang mutlak dan sangat penting. Sebab merupakan landasan ketahanan suatu bangsa menghadapi perubahan kehidupan yang semakin kompleks. Tanpa adanya prinsip moral atau akhlak yang baik, kehidupan suatu bangsa dipastikan akan dibinasakan oleh Tuhan. Sebuah syair dalam bahasa Arab menerangkan masalah ini: “Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama (mereka berpegang) pada akhlaknya, bila akhlak mereka rusak, maka rusak binasa pulalah mereka”.

Prinsip moral kemanusiaan itu sendiri sangat terkait dengan agama, terutama dengan rasa ketuhanan. Rasa kemanusiaan hanya terwujud jika dilandasi rasa ketuhanan. Rasa kemanusiaan yang lepas dari rasa ketuhanan, akan menyebabkan terjadinya praktek-praktek pemutlakan sesama manusia. Oleh sebab itu kemanusiaan sejati harus bertujuan pada keridhaan Tuhan semata. keridhaan Tuhan ini merupakan landasan bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan seseorang. Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Alquran surat Al-Fathir ayat 10 yang terjemahannya:

“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur.”

Konsep Etika Politik Islam Menurut Nurcholis Majid

Konsep etika politik dalam pemahaman agama menurut Nurcholish Madjid, di sini meliputi agama Yahudi, agama Budha, agama Hindu, agama Nasrani, dan agama Islam.¹⁶

1. Dalam ajaran Yahudi, fondasi membentuk etika adalah the self (diri) selalu bertanggung jawab dari pada the Other (Orang lain). Tanggung jawab ini bukan pilihan, juga bukan sesuatu yang kita peroleh melalui sosialisasi atau melalui keputusan sadar untuk menjalani kehidupan moral. Sebagai anggota dari suatu negara, kita memikul hak sebagai warga negara atau sebagai imigran yang diakui secara legal.
2. Dalam ajaran agama Budha, etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal tersebut menjadi syarat utama yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan suatu bangsa.
3. Etika Politik Agama Hindu tertuang dalam Nitisastra yang mengajarkan kepatuhan warga negara terhadap hukum dan kebijaksanaan pemerintah, dengan kata lain mengajarkan warganya untuk selalu ikut dalam pembinaan negara.
4. Etika politik Agama Nasrani yaitu adanya pemisahan gereja dengan negara, antara agama dan politik, karena dalam pengamalan mereka, penyatuan antara gereja dan negara, antara agama dan politik hanya akan menghasilkan beban ganda.
5. Dalam agama Islam, Nabi Muhammad Saw., telah meletakkan dasar-dasar sistem sosial-politik yang terbuka, yang memberi keleluasaan bagi adanya partisipasi warga masyarakat kaum beriman.

Partisipasi politik bermula dari adanya hak individu. Kebaikan itu harus dalam rangka kebaikan kolektif. Adanya budaya musyawarah dalam etika politik. Etika politik bagi kaum muslim berakar dalam ajaran agamanya, dan bersangkutan dengan prinsip-prinsip tentang hak dan kewajiban masing-masing orang dalam masyarakat itu.

¹⁶Yunie Risma Riyantie, ‘Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam’ (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Implementasi Etika Politik Islam Menurut Nurcholis Majid

Nurcholish Majid, seorang cendekiawan Islam yang kontroversial namun kontributif, mengembangkan pemikiran etika politik Islam yang mencakup prinsip-prinsip berikut:

1. **Musyawah (Syura):** Nurcholish menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan politik. Musyawarah memungkinkan partisipasi aktif dan inklusif dari berbagai pihak.¹⁷ Musyawarah (Syura) merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh Nurcholish Majid, yang dalam pandangannya menjadi pilar utama dalam proses pengambilan keputusan politik. Baginya, musyawarah bukanlah sekadar alat formalitas, tetapi merupakan esensi dari demokrasi yang sehat dan inklusif. Dia meyakini bahwa musyawarah membuka pintu bagi partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat, memungkinkan setiap suara untuk didengarkan dan dipertimbangkan dengan serius. Dalam konteks politik yang dinamis dan kompleks, musyawarah memberikan wadah bagi perdebatan yang konstruktif dan pertukaran ide yang substansial. Nurcholish menegaskan bahwa melalui musyawarah, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang menghargai pluralitas dan keberagaman, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai inklusifitas dan keadilan. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya tentang mencapai kesepakatan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan solidaritas di antara berbagai aktor politik. Secara keseluruhan, bagi Nurcholish, musyawarah menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun sistem politik yang responsif dan berdaya tahan, di mana keputusan yang diambil mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
2. **Keadilan (Al-'Adl):** Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara. Keadilan harus menjadi landasan dalam kebijakan politik.¹⁸ Keadilan (Al-'Adl) adalah prinsip yang memiliki bobot besar dalam pandangan politik, khususnya menurut perspektif yang ditekankan oleh banyak pemikir dan tokoh seperti Nurcholish Majid. Baginya, keadilan bukanlah sekadar slogan kosong, melainkan prinsip yang harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan politik yang dibuat dan diimplementasikan. Ini berarti bahwa perlakuan yang adil dan setara harus menjadi standar bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, agama, etnisitas, atau status sosial. Keadilan, dalam konteks politik, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari distribusi sumber daya hingga perlakuan hukum. Oleh karena itu, kebijakan politik yang didasarkan pada prinsip keadilan harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok mana pun, dan bahwa kepentingan seluruh masyarakat diakomodasi secara merata. Nurcholish Majid menekankan bahwa tanpa keadilan sebagai landasan, sebuah sistem politik tidak dapat dianggap legitim. Keadilan menciptakan dasar yang stabil bagi masyarakat untuk berkembang secara berkelanjutan, serta menjaga kedamaian dan stabilitas sosial. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi tujuan yang harus dicapai, tetapi juga menjadi prinsip yang harus terus dijaga dan diperjuangkan dalam setiap tindakan politik.
3. **Egalitarianisme (Al-Musawah):** Nurcholish mengajukan watak universal, plural, dan inklusivisme dalam berpolitik. Semua individu harus memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang atau status sosial.¹⁹ Egalitarianisme (Al-Musawah) adalah konsep yang sangat diperjuangkan oleh Nurcholish Majid dalam dunia politik. Baginya, egalitarianisme bukan hanya sekadar prinsip, melainkan juga sebuah panggilan moral yang mendasar. Dia menekankan pentingnya menerima dan menerapkan nilai-nilai universal, pluralisme, dan inklusivitas dalam segala aspek kehidupan politik. Dalam pandangannya, setiap individu memiliki martabat yang sama dan hak yang sama, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Artinya, semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap kebijakan yang dibuat. Baginya, kesetaraan bukanlah sekadar konsep ideal, tetapi juga prinsip yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

¹⁷Dudung Abdullah, 'Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), h. 53-242 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509>.

¹⁸Lily Putri Sinurat and Miftakul Huda, 'Rismawati 1 ; Lily Putri Sinurat 2 ; Miftakul Huda 3 *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*', *Maret*, 2.1, h. 52-61.

¹⁹Agus Riyadi, 'ISLAM YES, PARTAI ISLAM NO (Analisa Terhadap Pemikiran Nurcholish Majid Tentang Politik Islam)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2006).

²⁰Guruh Untung Laksana, 'Implementasi Hak Kesetaraan Hukum Di Kota Serang', *Jurnal Pelita Bumi Pertiwi*, 4.4 (2022), h. 57-64.

Oleh karena itu, dalam politiknya, Nurcholish Madjid mendorong adanya upaya nyata untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural yang ada dalam masyarakat, baik itu dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, atau hak-hak dasar lainnya. Egalitarianisme, menurutnya, adalah fondasi yang kuat bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan menerapkan nilai-nilai egalitarianisme ini, Nurcholish Madjid percaya bahwa masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan sejahtera bagi semua orang.

SIMPULAN

Nurcholis Madjid merupakan pemikir Islam kontemporer pada akhir abad ke-20 di Indonesia. Nuckholis Majid memandang etika politik dalam Islam sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Saat negara mulai mengokohkan hegemoninya terhadap rakyat, semangat demokrasi sedang dipertaruhkan.

Landasan moral etika politik menurut Nurcholish Madjid yaitu kehidupan politik tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar akhlak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika politik. Tuntunan moral yang tinggi dalam etika politik, secara konsisten meliputi prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan. Permasalahan prinsip moral kemanusiaan dan keadilan merupakan hal yang mutlak penting adanya. Karena merupakan landasan ketahanan suatu bangsa menghadapi perubahan kehidupan yang semakin kompleks.

Signifikansi pemikiran etika politik Nurcholish Madjid bagi perpolitikan di Indonesia, sebenarnya ingin menunjukkan bahwa semangat Pancasila itu tidak lain adalah terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang setiap warganya memperoleh kebebasan bertindak. Pancasila sebagai titik temu agama-agama di Indonesia. Selain itu, pemikiran etika politik Nurcholish Madjid dapat mengobarkan kembali eksistensi Pancasila sebagai identitas etika politik bangsa Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, Dudung, 'Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 242–53 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509>
- Aldy dwi mulyana, 'Etika Politik Arkoun Dengan Negara Hukum Demokratis', *Journal Information*, 2.30 (2013), 1–17
- Amin, Ahmad, and Abdul Qadir Jailani, 'Etika Politik Dalam Pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyah Losari-Ploso Jombang', 1–21
- Dahlan, Dewi, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)', *Menara Ilmu*, 15.1 (2021), 42–50 <<https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2389>>
- Hartini, Dwi, 'Hegemoni Pemikiran Keagamaan: Etika Politik Dalam Perspektif Wahdah Islamiyah', *Asketik*, 3.1 (2019), 47–59 <<https://doi.org/10.30762/ask.v3i1.1157>>
- ICPEN, 'Etika Politik Perspektif NurKholis Majid', *Resma*, 3.2 (2016), 13–22
- Jawahir, Muhammad, 'Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Politik Islam', *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 53.95 (2012), 45–52
- Kumble, Ganesh Prasad, یوسفی رش نارم, สุรัตน์ จงดา, Christoph Thuemmler, Chunxue Bai, Jurgen Appelo, and others, *KONSEP POLITIK MACHIAVELLI DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM*, *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 2020, LIII
- Kurniati, Kurniati, 'Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara : Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.2 (2018), 257 <<https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>>
- Laksana, Guruh Untung, 'Implementasi Hak Kesetaraan Hukum Di Kota Serang', *Jurnal Pelita Bumi Pertiwi*, 4.4 (2022), 57–64
- Muflihudin, 'Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah', 2018 <<http://repository.radenintan.ac.id/3417/1/MUFLIHUDIN.pdf>>
- Putri Sinurat, Lily, and Miftakul Huda, 'Rismawati 1 ; Lily Putri Sinurat 2 ; Miftakul Huda 3 Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi', *Maret*, 2.1, 52–61

- Qamar, Nurul, *Etika Dan Moral Profesi Hukum: (Ethos and Mores Profession of Law)* (CV. Social Politic Genius (SIGN), 2019)
- Riyadi, Agus, 'ISLAM YES, PARTAI ISLAM NO (Analisa Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Politik Islam)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2006)
- Riyantie, Yunie Risma, 'Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Stocks, Noel, 'Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi) Nasitotul Janah', 2016, 1–23
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar, and Kenegaraan Modern*, 'Franz Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Cet. Ke 7, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 21.'
- Wardani, Novita ika, lumastari ajeng Wijayanti, urhuhe dena Siburian, Arditya Prayogi, afrah diba Faisal, Hikmah, and others, *Ilmu Sosial Budaya Dasar Untuk Kebidanan, CV. Budi Utama, 2023*